



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur  
Fax. (021) 29079176, website : [www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id)  
JAKARTA PUSAT

Nomor : 55/DJU/HK.00.1/1/2019  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : Target SPPT-TI Tahun 2019-2020

Jakarta, 15 Januari 2019

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Medan,  
Bandung, Surabaya dan Makassar  
di  
tempat

Memperhatikan arahan YM Ketua Mahkamah Agung atas Surat Memko Polhukam Nomor B.307/HK.00.01/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 yang menunjuk 15 Pengadilan Negeri pada 5 Pengadilan Tinggi sebagai *Pilot Project* SPPT-TI terhitung mulai Januari 2019 yaitu :

1. PT Medan (PN Medan, PN Pematang Siantar, dan PN Lubuk Pakam)
2. PT Jakarta (PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, dan PN Jakarta Barat)
3. PT Bandung ( PN Bandung, PN Bale Bandung, dan PN Bogor)
4. PT Surabaya (PN Surabaya, PN Sidoarjo, dan PN Jember)
5. PT Makassar ( PN Makassar, PN Palopo, dan PN Sungguminasa)

maka diminta agar Saudara memonitor pelaksanaan kewajiban penginputan data tindak pidana umum dan melaporkan perkembangan setiap bulan kepada kami untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi.

Untuk diketahui bahwa Program SPPT-TI merupakan salah satu Program Unggulan Pencegahan Korupsi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Demikian untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**HERRI SWANTORO**



Tembusan disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yth Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Yth Kepala Biro Hukum dan Humas.

Lampiran :

Kelengkapan data pada Aplikasi SIPP yang perlu menjadi perhatian bagi 15 satker *pilot project* antara lain :

1. Nomor dakwaan dan amar dakwaan;
2. Nomor pelimpahan perkara dari kejaksaan;
3. Penetapan Majelis Hakim;
4. Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang;
6. Amar Putusan; dan
7. Softcopy / E-doc Putusan Akhir.



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 307 /HK.00.01/12/2018 Jakarta, 31 Desember 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Target SPPT-TI Tahun 2019-2020.

Kepada Yth. :

1. **Ketua Mahkamah Agung RI**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir
2. **Kapolri**  
Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru
3. **Jaksa Agung RI**  
Jl. Sultan Hassanuddin No. 1, Kebayoran Baru
4. **Menteri Hukum dan HAM RI**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan  
Di - Jakarta

Mendasari surat kami Nomor : B-168/Menko/Polhukam/De-III/HK.04.04.2/09/2017 tanggal 11 September 2017 tentang penentuan daerah *Pilot Project* SPPT-TI, telah dilaksanakan rapat pembahasan penentuan target SPPT-TI Tahun 2019-2020 oleh Pokja Percepatan dan Pengembangan SPPT-TI Tahun 2018 pada tanggal 09 November 2018 dan 18 Desember 2018 yang hasilnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 untuk 5 (lima) daerah *Pilot Project* SPPT-TI (Daerah Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) menjadi wilayah operasional SPPT-TI di tahun 2019, sehingga mempunyai kewajiban melaksanakan penginputan data tindak pidana umum versi ringkas. Selanjutnya oleh satuan kerja di tingkat pusat data-data tersebut akan dipertukarkan melalui Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT-TI.
2. Untuk itu kiranya Saudara dapat memberikan atensi khusus terhadap 5 (lima) daerah tersebut, serta memberikan laporan perkembangan setiap bulannya untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi, karena program SPPT-TI telah dijadikan salah satu program unggulan pencegahan korupsi sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih

Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan Keamanan,

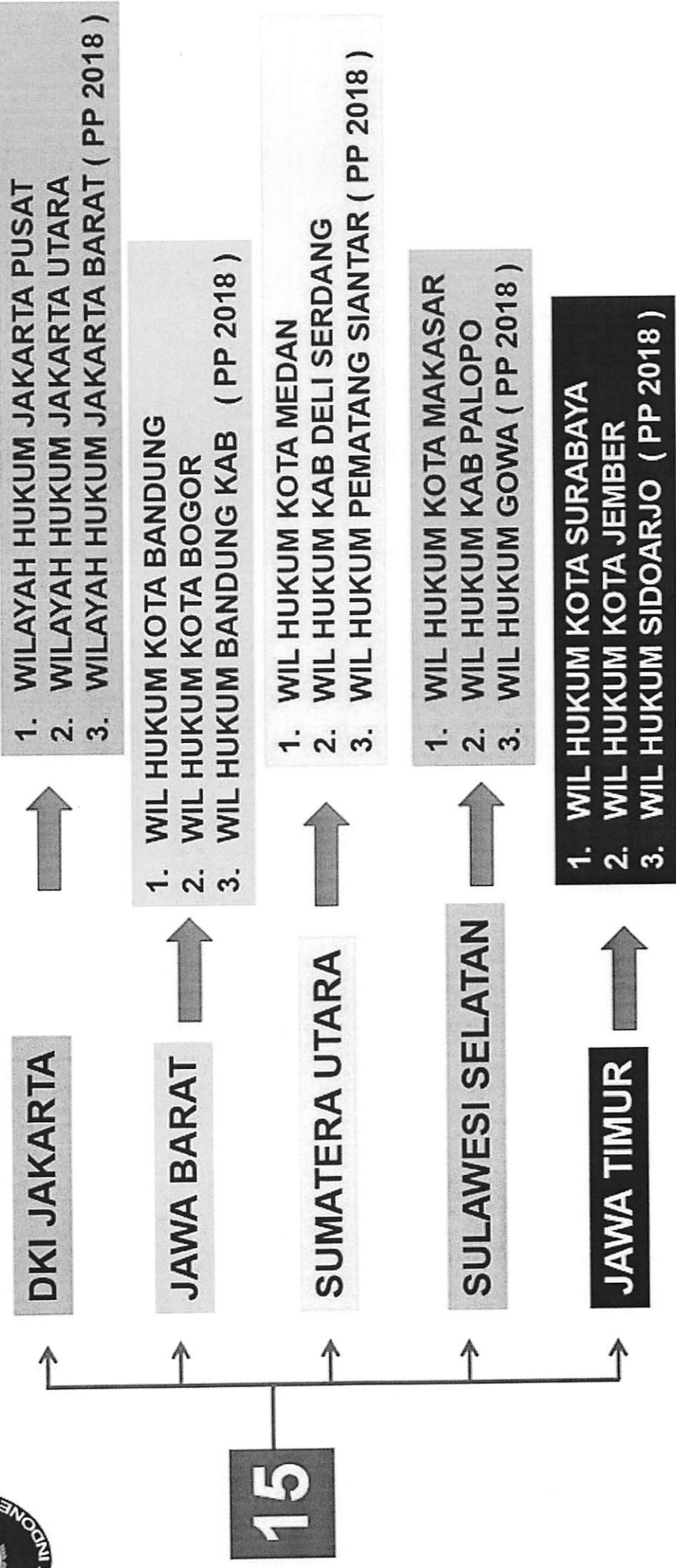
Wiranto

Tembusan :  
Yth. Presiden RI.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110  
Telenon (021) 3520145. Faksimile (021) 3860354. 34830612.



**TARGET WILAYAH PILOT PROYEK B03  
JANUARI SD MARET 2019**



**MOHON MASING MASING K/L AGAR MENINGGATKAN UNTUK 15 WILAYAH TERSEBUT  
MULAI MELAKUKAN KEWAJIBAN INPUT DATA SELANJUTNYA K/L PUSAT MELAKUKAN PERTUKARAN DATA**